



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NORMAN WIDJAJADI, S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI LAMPUNG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
LAMPUNG**

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

NORMAN WIDJAJADI, S.I.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	2 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,87 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	87,2 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	6 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		(IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,72 Indeks
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	13 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	SANGAT BAIK -
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	5 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,71 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	5 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	84,98 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.455.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.450.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.1.026.329.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp.150.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.82.422.000

6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.662.155.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.151.530.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.250.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.750.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.616.002.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.8.616.400.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.70.160.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.192.146.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.7.325.766.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.35.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
LAMPUNG**

NORMAN WIDJAJADI, S.I.K.